

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arifin, Zainal dan Hiariej, Eddy Os. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Red & White Publishing, 2021.

Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT Alumni, 2013.

Bambang, Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

_____. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Isnur, Muhamad, dkk. *Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2014.

Khakim, Abdul. *Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, antara Peraturan dan Pelaksanaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2015.

Mahkamah Agung. *The Electronic Justice System*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.

_____. *e-Litigasi: Persidangan secara Elektronik Hemat Biaya, Waktu & Energi*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2022.

- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- _____. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Pangaribuan, Juanda. *Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Simangunsong, Bahal, dkk. *Hakim Ad hoc Menggugat (Catatan Kritis Pengadilan Hubungan Industrial)*. Jakarta: TURC, 2009.
- Sundari, E. *Praktik Class Action di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Suparman, Supomo. *Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ugo dan Pujiyo. *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung:

PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2004.

Jurnal:

Firdaus, Dian, dkk. “Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) pada Pengadilan Hubungan Industrial (Analisis

Putusan Mahkamah Agung No. 83k/Pdt.Sus-PHI/2015).” *Diponegoro Law*

Journal 5, no. 4 (2016): 2, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13747>

Maswandi. “Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam

Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Indonesia.” *Penegakan*

Hukum 3, no. 1 (2016): 60. <https://doi.org/10.31289/jiph.v3i1.1892>.

Putri, Sherly Ayuna, dkk. “Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan

Ketenagakerjaan di Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas

Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian

Hukum.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 311.

<https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.307>.

Mawarni, Mahdian Astira, dkk. “Implementasi Pasal 103 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di

- Pengadilan Hubungan Industrial Semarang.” *S.L.R.* 2, no. 4 (2020): 691.
<https://doi.org/10.20884/1.slr.2020.2.4.113>.
- Tobing, Christina NM. “Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum dan Keadilan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 300.
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.297-326>.
- Seruni, Puti Mayang. “Asas Peradilan Cepat Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Lokasi Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta).” *UIR Law Review* 3, no. 1 (2019): 93.
[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(1\).15592](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(1).15592).
- Widowati. “Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.” *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 100.
<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.322>.
- Sirait, Adi Syahputra. “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): 26.
<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.4012>.
- Supono. “Menuju Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang Cepat, Tepat, Adil, dan Murah.” *Jurnal Kajian* 19, no. 2 (2014): 112.
<http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v19i2.551>.

Disertasi:

Ida Ayu Mustikawati. “Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).” Universitas Pasundan, 2023.
<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64629>.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan

Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah

Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2023 tentang Upah

Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus Nomor

165/KPN.W12-U1/SK.HK2.4/X/2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata

dan Permohonan Serta Gugatan Sederhana, Pemeriksaan Setempat,

Pencocokan (Konstatering) Objek yang Dieksekusi, Sita Eksekusi, Eksekusi,

Perkara Perdata Khusus Niaga dan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Semarang Kelas IA Khusus.

Wawancara:

Ledyanto, Gandung. Hasil Wawancara Pribadi: 24 April 2025. Hakim *Ad Hoc*. PHI

Semarang.

Internet:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2025. Profil Kemiskinan di Indonesia

September 2024 Provinsi Jawa Tengah. Website: [Profil Kemiskinan di](#)

[Indonesia September 2024 Provinsi Jawa Tengah](#), diakses pada tanggal 3

Maret 2025, pukul 17:15 WIB.

Pengadilan Negeri Semarang. 2024. *Daftar Perkara Hubungan Industrial*. Website: [Daftar Perkara Hubungan Industrial](#), diakses pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 21:37 WIB.

Pengadilan Negeri Semarang. 2024. *Daftar Perkara Hubungan Industrial*. Website: [Daftar Perkara Hubungan Industrial](#), diakses pada tanggal 29 Juni 2024, pukul 15:22 WIB.

Pengadilan Negeri Semarang. 2024. *Informasi Detail Perkara Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg*. Website: [Daftar Perkara Hubungan Industrial](#), diakses pada tanggal 22 Mei 2025, pukul 07:52 WIB.

Pengadilan Negeri Semarang. 2024. *Informasi Detail Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg*. Website: [Daftar Perkara Hubungan Industrial](#), diakses pada tanggal 22 Mei 2025, pukul 07:57 WIB.

Pengadilan Negeri Semarang. 2024. *Informasi Detail Perkara Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg*. Website: [Daftar Perkara Hubungan Industrial](#), diakses pada tanggal 22 Mei 2025, pukul 08:10 WIB.

Pengadilan Negeri Semarang. 2024. *Informasi Detail Perkara Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg*. Website: [Daftar Perkara Hubungan Industrial](#), diakses pada tanggal 22 Mei 2025, pukul 08:17 WIB.